

**ANALISIS YURIDIS ATAS KEBERADAAN BANK PEMBIAYAAN SYARIAH
DALAM PENGEMBANGAN BP BATAM DIKAITKAN DENGAN PERSAINGAN
LEMBAGA KEUANGAN BANK LAINNYA SEBAGAI UPAYA DALAM
MENSEJAHTRAKAN MASYARAKAT MENENGAH KE BAWAH**

Raja Igayu Muhammad Riski

1487051

ABSTRAK

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia memiliki indikator yaitu pertumbuhan dan pendapatan nasional, salah satunya di dalam sektor perbankan. Perbankan dalam melakukan kegiatan bisnis memiliki visi dan misi sebagai agen pembangunan yaitu untuk meningkatkan pemerataan dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kota Batam sebagai wilayah perdagangan bebas memiliki lokasi yang strategis didalam peningkatan nasional, sehingga potensi lembaga keuangan memiliki peran yang besar dan mendasar untuk kegiatan perekonomian. Perbankan yang ada di Kota Batam terdiri dari Bank Konvensional dan Bank Syariah. Kedudukan dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah sepatutnya bisa memberikan peran dalam perekonomian di Kota Batam mengingat kondisi perekonomian di Kota Batam sangatlah berkembang

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak, digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini yaitu perkembangan Bank Pembiayaan Syariah di Kota Batam yang dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memfasilitasi bisnis perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data yang digunakan yaitu data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, bahan hukum sekunder berupa studi kepustakaan, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Sebagai data penunjang peneliti juga melakukan wawancara kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam dan 2 BPRS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan perekonomian di Kota Batam sangatlah berkembang namun regulasi mengenai perekonomian khususnya di sektor perbankan belum di implementasikan dalam peraturan di Kota Batam, khususnya dalam pengembangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Kota Batam masih menggunakan Peraturan secara umum dan belum diterapkan/dibentuk peraturan daerah yang dapat mengakomodir pertumbuhan BPR Syariah.

BPR Syariah terdapat 2 BPR Syariah yaitu BPR Syariah Vitka Central dan BPR Syarikat Madani. Perlu adanya sosialisasi dan pemahaman untuk masyarakat akan lebih memahami dengan perkembangan BPR Syariah di Kota Batam. Penulis dalam hal ini perlu adanya regulasi dari pemerintah Kota Batam untuk dapat mempermudah BPRS& mensosialisasikan mengenai manfaat dari produk-produk syariah baik yang dilakukan pemerintah maupun perbankan sehingga masyarakat dapat mengetahuinya lebih jelas.

Kata Kunci : Bank Pembiayaan, Bank Syariah , Perbankan, Perkembangan Ekonomi, Bank Pembiayaan Syariah.

**JURIDICAL ANALYSIS TO THE EXISTENCE OF BANK SYARIAH
FINANCING IN THE DEVELOPMENT OF BP BATAM ASSOCIATED
WITH COMPETITION OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS BANKS IN
AN EFFORT TO PROSPER PEOPLE FROM LOWER MIDDLE CLASS**

Raja Igayu Muhammad Riski

1487051

ABSTRACT

Economic growth in Indonesia has indicators growth and national income, one of them is in the bankin sector banking om bussines activities in defiance of a with vision and mission as an agent of development for the society. The Batam City as a free tarde strategic place in the national. The potential financial institutions have a large role and essential to economic activities. Banks in Batam consist of conventional banks and sharia banks. The position of a Sariah lender bank should be able to give a role in the economy in the city of Batam to improve the economic conditions in Batam City which is very developing.

This study uses descriptive qualitative method is to give an overview of the current actual issues based on the facts that seemed used in accordance with the problem whice is the focus of research. The development of sharia financing bank in Batam City is associated with central government policy and local government in facilitating the busniss of sharia banking. Ths research uses methods of conceptual approaches and legislation, the data used is secondary data with primary legal materials, namely law No. 21 of 2008 concerning Islamic bangking, Law number 46 of 2007 concerning Free Trade Zone and Free Port of Batam, legal materials secondary literary studies, and tertiary legal materials in the from a legal dictionary. Research also conducted interview to BP Batam, Batam City government and two of BPRS. The results of this study indicate that economic development in the city of Batam is not yet implemented in the regulation in the City of Batam, and still using the rules in general amd also it has not applied regional regulations that can accommodate the growth of BPR Sariah.

The development of the syaria BPR in Batam still has not shown significant result because there are only two sharia BPRS name Bank Perkreditan Rakyat Syariah Vitka Central and Bank Prekreditan Rakyat Syariah Madani. Surely this is very contrary to the Muslim majority Batam society. Need For Socialization and understanding for the community will better understand the development of BPR Syaria in Batam City.

Keyword: Bank Financig, Shariah Bank, Banks, Economic development, Bank Syariah Financing

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II PEREKONOMIAN ISLAM DAN PERKEMBANGAN SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA	
A. Sistem Perbankan Nasional Di Indonesia	24
1. Hubungan Ekonomi dan Hukum.....	24
2. Sejarah Dan Perkembangan Perbankan	28
3. Bank Sebagai Lembaga Intermediasi.....	29
a. Bank dan Fungsinya Sebagai Lembaga Keuangan....	40
b. Perekonomian Islam Dan Perbankan Syariah.....	53
1. Sistem Perbankan Syariah.....	53
2. Ruang Lingkup Kegiatan Usaha	

Bank Syariah.....	56
B. Pengembangan Perbankan Nasional Ditinjau Dari	
Regulasi Pemerintah dan Implementasi dalam	
Produk-Produk Syariah.....	58
1. Perkembangan Regulasi Dalam	
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008	
Tentang Perbankan Syariah.....	58
2. Penyebaran Produk-Produk Syariah.....	64
BAB III KEBIJAKAN BP BATAM DAN PEMERINTAH	
KOTA BATAM DALAM MENOMPANG PEREKONOMIAN	
PERBANAKN DI KOTA BATAM.....	72
A. Konsep desteralansi dan kewenangan daerah dalam	
Membuat kebijakan, khususnya untuk BP Batam	72
1. Sejarah Otorita Batam/ Badan Pengusaha	
Batam.....	72
2. Perkembangan Pembentukan Badan	
Pengusaha Batam.....	97
3. Perkembangan Pembentukan Pemerintah Kota	
Batam Sebagai Konsep Destralisasi	
Tahun 2014.....	110
B. Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Kota Batam dan Otorita	
Batam di Bidang Perekonomian.....	116
1. Kebijakan Dan Regulasi Pemerintah Daerah	

Kota Batam.....	116
2. Kebijakan dan Regulasi Otorita Batam/ BP Batam terhadap perekonomian.....	124
C. Kewenangan dan Relevansi Keberadaan Badan Pengusaha Batam di Hubungkan Dengan Kewenangan Pemerintah Kota Batam.....	126
1. Kewenangan Badan Pengusaha Batam Dihubungkan dengan Kewenangan Pemerintah Kota Batam.....	126
2. Dualisme Pemerintah.....	131
D. Kebijakan Tentang Perekonomian Khususnya Perbankan....	133
BAB IV ANALISIS YURIDIS ATAS KEBERADAAN BANK PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN BP BATAM DIKAITKAN DENGAN INSTITUSI LEMBAGA KEUANGAN LAIN SEBAGAI UPAYA DALAM MENSEJAHTRAKAN MASYARAKAT MENENGAH KEBAWAH.....	135
A. Regulasi Perbankan Syariah yang di Berlakukann oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terkait perkembangan BP Batam	135
1. Pendirian Bank Syariah Di Kota Batam.....	135
2. Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan Pangsa bisnis Di Kota Batam.....	145
B. Kebijakan Dari Pemerintah Kota Batam Untuk Mengakomodir Pertumbuhan Perbankan Syariah Khususnya Dalam Jaringan BPR Syariah Di Kota Batam.....	154

1. Regulasi Kota Batam Berkaitan Dengan Perekonomian Khususnya Perbankan Syariah.....	154
2. Kebijakan Pemerintah Kota Batam Dalam Kaitannya Dengan Pertumbuhan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.....	157

C. Bagaimana Produk-Produk Bank Perkreditan Rakyat Syariah Vitka Central dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Syarikat Madani Telah Menunjang Untuk Kemakmuran Perbankan Syariah Di Kota Batam.....	160
1. Produk-Produk Bank Perkreditan Rakyat Syariah Vitka Central.....	160
2. Produk-Produk Bank Perkreditan Rakyat Syariah Syarikat Madani.....	165

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	178
B. Saran.....	180
C. Daftar Pustaka.....	183

Lampiran